Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 37358-37365

Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIKS-NG Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi

Nopes Scorpion[1], Sufian Hamim[2], Raden Imam Al Hafis[3], Rendi Prayuda[4]
[1,2,3,4]Universitas Islam Riau, Pekanbaru
Corresponding Author: Nopes Scorpion, e-mail: nopesscorpion@gmail.com

Published: July , 2026

ABSTRACT
Digital transformation in government administration has encouraged the utilization of information technology to improve the quality of public services, including social assistance management. One of the innovations implemented by the government is the Social Welfare Information System Next Generation (SIKS-NG), which serves as a tool for managing the Integrated Social Welfare Data (DTKS) used as the basis for determining social assistance beneficiaries. This study aims to analyze the effectiveness of SIKS-NG implementation at the village level in Kuantan Singingi Regency. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village officials, SIKS-NG operators, social facilitators, and community members. The findings indicate that SIKS-NG has facilitated a more systematic and structured process of data collection, verification, and updating of social assistance beneficiaries. However, its effectiveness is still constrained by several issues, including overlapping beneficiary data, the inclusion of ineligible recipients, inconsistencies between updated data and subsequent beneficiary lists, and limitations in information technology infrastructure. These conditions have contributed to social discontent and reduced public trust in the social assistance data management system. Therefore, improvements in data integration, strengthening validation mechanisms, enhancing operator capacity, and providing adequate supporting infrastructure are necessary to improve the effectiveness of SIKS-NG in social assistance management.

Keywords: Effectiveness, SIKS-NG, Social Assistance, Public Administration, Kuantan Singingi Regency.

ABSTRAK
Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial. Salah satu inovasi yang digunakan pemerintah adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai instrumen pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi SIKS-NG pada tingkat desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah desa, operator SIKS-NG, pendamping sosial, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIKS-NG telah membantu proses pendataan, verifikasi, dan pembaruan data penerima bantuan sosial secara lebih sistematis dan terstruktur. Namun demikian, efektivitas penggunaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih data penerima bantuan sosial, munculnya penerima yang tidak memenuhi kriteria, ketidaksesuaian antara data hasil pembaruan dengan daftar penerima bantuan pada periode berikutnya, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya kecemburuan sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan integrasi data, penguatan mekanisme validasi, peningkatan kapasitas operator, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai guna meningkatkan efektivitas penggunaan SIKS-NG dalam pengelolaan bantuan sosial.

Kata Kunci: Efektivitas, SIKS-NG, Bantuan Sosial, Administrasi Publik, Kabupaten Kuantan Singingi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai sarana untuk meningkatkan

efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam bidang kesejahteraan sosial, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) sebagai instrumen utama dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.

SIKS-NG dirancang untuk mendukung proses pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terintegrasi dari tingkat desa hingga pusat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan bantuan sosial dapat berlangsung secara lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG, terutama dalam melakukan pembaruan data masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan sosial.

Namun demikian, implementasi aplikasi SIKS-NG di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan sistem tersebut. Kondisi ini juga ditemukan pada pemerintah desa di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun aplikasi SIKS-NG telah digunakan dalam proses pengelolaan data bantuan sosial, masih terdapat berbagai kendala yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaannya.

Permasalahan pertama yang sering terjadi adalah masih adanya data penerima bantuan sosial yang tumpang tindih. Pemerintah desa masih menerima data yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual masyarakat di lapangan. Akibatnya, proses verifikasi dan validasi data sering memerlukan waktu dan tenaga tambahan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Permasalahan kedua adalah masih ditemukannya warga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, namun namanya tetap tercantum sebagai penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang tersimpan dalam sistem dengan kondisi riil masyarakat. Situasi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas program bantuan sosial karena bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang membutuhkan justru diterima oleh pihak yang tidak berhak.

Permasalahan ketiga yang menjadi perhatian adalah adanya kasus dimana nama penerima bantuan yang telah dinyatakan tidak layak dan telah dihapus melalui mekanisme pembaruan data dalam aplikasi SIKS-NG, namun pada periode penyaluran berikutnya nama tersebut masih muncul kembali dalam Berita Acara Nama dan Alamat (BNBA) yang dikirim oleh Kementerian Sosial. Kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi pemerintah desa serta memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian menduga adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dalam proses pendataan bantuan sosial. Dampaknya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial menjadi menurun.

Menurut Richard M. Steers (1985), efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan organisasi, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, serta memperoleh dukungan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan teori efektivitas Richard M. Steers dan disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai penggunaan aplikasi SIKS-NG pada tingkat desa di Kabupaten Kuantan Singingi, maka efektivitas penggunaan aplikasi SIKS-NG dianalisis melalui lima indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran bantuan sosial merupakan kemampuan aplikasi SIKS-NG dalam menghasilkan data penerima bantuan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Indikator ini menilai apakah bantuan sosial telah diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sistem yang efektif harus mampu meminimalkan kesalahan sasaran, baik berupa inclusion error (masyarakat tidak layak menerima bantuan tetapi terdaftar sebagai penerima) maupun exclusion error (masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar dalam sistem).

2. Akurasi dan Pembaruan Data

Akurasi data menunjukkan tingkat kesesuaian antara data yang tersimpan dalam aplikasi dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya di lapangan. Sementara itu, pembaruan data berkaitan

dengan kemampuan sistem dalam memperbarui informasi secara berkala sesuai perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Indikator ini penting karena kualitas penyaluran bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Semakin akurat dan mutakhir data yang tersedia, maka semakin efektif penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam mendukung program bantuan sosial.

3. Dampak Sosial dalam Masyarakat

Efektivitas suatu sistem informasi tidak hanya diukur dari aspek teknis dan administratif, tetapi juga dari dampak sosial yang ditimbulkan. Penggunaan SIKS-NG yang efektif diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan sosial, mengurangi kecemburuan sosial, serta meminimalkan konflik yang muncul akibat ketidaktepatan sasaran bantuan sosial.

Sebaliknya, apabila sistem menghasilkan data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan, konflik sosial, dan berbagai permasalahan sosial lainnya.

4. Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem

Kepercayaan masyarakat merupakan bentuk penerimaan publik terhadap hasil yang dihasilkan oleh sistem. Menurut Richard M. Steers, efektivitas organisasi juga dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh dukungan dari lingkungan eksternal.

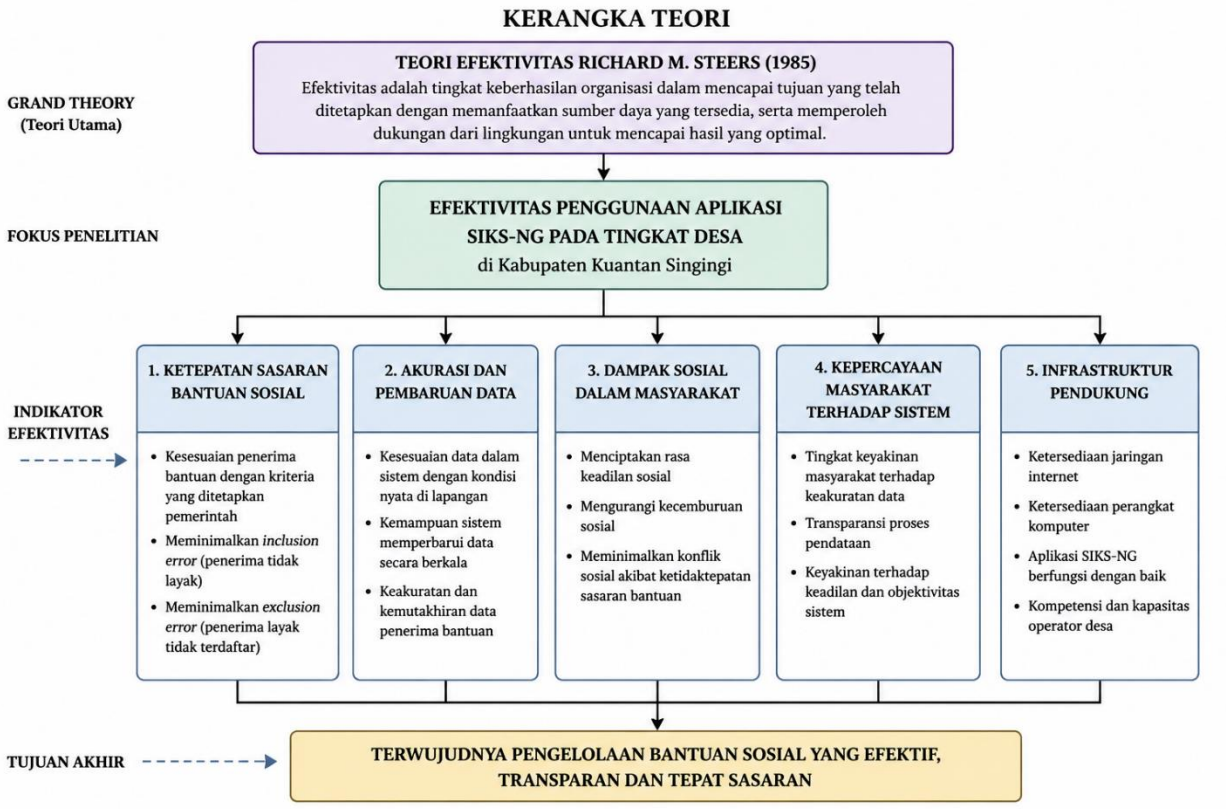
Dalam penelitian ini, kepercayaan masyarakat diukur melalui tingkat keyakinan masyarakat terhadap keakuratan data penerima bantuan sosial, transparansi proses pendataan, serta keyakinan bahwa sistem mampu menghasilkan keputusan yang adil dan objektif. Tingkat kepercayaan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem telah berfungsi secara efektif dalam memenuhi harapan masyarakat.

5. Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur pendukung merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu sistem informasi. Infrastruktur tersebut meliputi ketersediaan jaringan internet, perangkat komputer, aplikasi yang berfungsi dengan baik, serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendukung kelancaran proses penginputan, pembaruan, dan pengelolaan data bantuan sosial. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur dapat menghambat efektivitas penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Kerangka Teori Menurut Richard M. Steers (1985)



Dalam konteks penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana aplikasi tersebut mampu mendukung pengelolaan data bantuan sosial secara tepat, akurat, transparan, dan dapat diterima oleh masyarakat.

Apabila berbagai permasalahan yang terjadi masih terus ditemukan, seperti data yang tumpang tindih, munculnya kembali nama penerima yang telah dihapus, maka akan menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan bantuan sosial, untuk itu perlu dilakukan penelitian bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi tersebut. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena permasalahan yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa, melainkan adanya indikasi bahwa sistem yang telah dirancang untuk mendukung tata kelola bantuan sosial yang baik belum mampu berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut atas maka peneliti memberikan judul pada penelitian ini **"Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIKS-NG pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi"**.

METODE

Jenis metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut *Moleong (2013)* dalam *(Rita Fiantika et al., 2022)* mendeskripsikan bahwa Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang mengamati fenomena berdasarkan subjek yang diteliti dan disajikan melalui deskriptif dalam bentuk kalimat terhadap suatu konteks yang memanfaatkan berbagai sumber ilmiah. Observasi dan pengkajian lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan key informan pada penelitian menggunakan *purposive sampling*. Peneliti menentukan beberapa informan yaitu, Pendamping Sosial sebagai perpanjang tangan dari Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, Sekretaris Desa dan masyarakat. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori *Richard M. Steers (1985)* dengan beberapa indikator:

1. Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial
2. Akurasi dan Pembaruan Data
3. Dampak Sosial dalam Masyarakat
4. Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem
5. Infrastruktur Pendukung

PEMBAHASAN

1. Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Secara konseptual, penggunaan SIKS-NG bertujuan menghasilkan data penerima bantuan yang tepat sasaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih ditemukan masyarakat yang tergolong mampu tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Sebaliknya, terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi dalam sistem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulau Komang, diketahui bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data yang tersedia dalam sistem.

> *"Masih ada masyarakat yang kondisi ekonominya sudah cukup baik tetapi namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Di sisi lain, ada warga yang memang membutuhkan bantuan namun belum masuk ke dalam data penerima bantuan." (Wawancara dengan Ade Putra, Sekretaris Desa Pulau Komang, 2026).*

Hal serupa juga disampaikan oleh Pendamping Bantuan Sosial yang menjelaskan bahwa proses pendataan sering mengalami keterlambatan dalam menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

> *"Perubahan kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu langsung tercatat dalam sistem. Akibatnya masih ada data penerima yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan, sementara masyarakat yang baru masuk kategori miskin belum terakomodasi." (Wawancara dengan Arief Rachman, Pendamping Bantuan Sosial, 2026).*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas aplikasi dalam menghasilkan data yang akurat masih belum optimal.



Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris Desa Pulau Komang, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi

2. Akurasi dan Pembaruan Data

Permasalahan utama yang sering ditemukan adalah ketidaksesuaian antara data hasil pembaruan dengan data penerima bantuan yang muncul pada periode berikutnya.

Beberapa operator desa telah melakukan penghapusan terhadap nama-nama yang dianggap tidak layak menerima bantuan melalui aplikasi SIKS-NG. Akan tetapi, pada tahap penyaluran berikutnya nama yang telah dihapus tersebut masih muncul sebagai penerima bantuan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Langsat Hulu.

> *"Kami sudah beberapa kali mengusulkan penghapusan nama warga yang dianggap tidak layak menerima bantuan melalui SIKS-NG, tetapi pada penyaluran berikutnya nama tersebut masih muncul dalam daftar penerima bantuan. Selanjutnya kami panggil nama bersangkutan dan menandatangani perjanjian diatas materai bahwa mereka tidak dibenarkan menerima bantuan karena tidak termasuk kedalam kategori" (Wawancara dengan Trendy Prabowo, Sekretaris Desa Langsat Hulu, 2026).*

Pendamping Bantuan Sosial juga menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan kendala dalam proses sinkronisasi data.

> *"Usulan perubahan data dari desa memang sudah dimasukkan ke dalam sistem, namun terkadang hasil pembaruan tersebut belum langsung muncul pada data penerima bantuan yang digunakan untuk penyaluran berikutnya." (Wawancara dengan Arief Rachman Pendamping Bantuan Sosial, 2026).*

Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan kendala pada proses sinkronisasi data antarlevel pemerintahan sehingga memengaruhi kualitas output sistem.



Gambar 3. Wawancara dengan Sekretaris Desa Langsat Hulu, Kec. Sentajo Raya, Kab.Kuantan Singingi

3. Dampak Sosial dalam Masyarakat

Ketidaktepatan data penerima bantuan sosial menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Masyarakat yang merasa lebih berhak menerima bantuan sering mempertanyakan mekanisme pendataan yang dilakukan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kampung Baru, ketidaksesuaian data penerima bantuan sering memicu keluhan dari masyarakat.

> *"Ketika masyarakat melihat ada warga yang dianggap mampu tetapi masih menerima bantuan, mereka langsung mempertanyakan kepada pemerintah desa. Situasi seperti ini sering menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat." (Wawancara dengan Indra Miko Sekretaris Desa Kampung Baru, 2026).*

Pendamping Bantuan Sosial juga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

> *"Sering kali kami menerima komplain dari masyarakat yang merasa lebih layak menerima bantuan. Bahkan ada beberapa warga yang enggan mengikuti proses pendataan karena merasa sistemnya belum adil." (Wawancara dengan Arief Rachman, Pendamping Bantuan Sosial, 2026).*

Dari perspektif administrasi publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu sistem informasi tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keadilan sosial dan legitimasi publik.

4. Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem

Ketika masyarakat menemukan banyak ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem pendataan menjadi menurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulau Komang, masyarakat sering mempertanyakan keakuratan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial.

> *"Masyarakat sering menyampaikan bahwa mereka tidak lagi memahami dasar penetapan penerima bantuan karena hasil yang muncul di lapangan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya." (Wawancara dengan Ade Putra, Sekretaris Desa Pulau Komang, 2026).*

Pendamping Bantuan Sosial juga menjelaskan bahwa sebagian masyarakat mulai meragukan efektivitas aplikasi SIKS-NG.

> *"Ada masyarakat yang beranggapan bahwa meskipun data sudah diperbaiki dan diajukan melalui sistem, hasilnya tetap tidak berubah. Hal ini membuat kepercayaan mereka terhadap sistem menjadi berkurang." (Wawancara dengan Trendy Prabowo, Sekretaris Desa Langsat Hulu, 2026).*

Persepsi tersebut menjadi tantangan serius karena kepercayaan publik merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Infrastruktur Pendukung

Keberhasilan implementasi SIKS-NG sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kampung Baru, kendala utama yang dihadapi adalah jaringan internet yang belum stabil.

> *"Kendala yang paling sering kami hadapi adalah jaringan internet yang tidak stabil. Saat melakukan penginputan atau pembaruan data, sistem terkadang lambat sehingga pekerjaan menjadi tertunda." (Wawancara dengan Indra Miko, Sekretaris Desa Kampung Baru, 2026).*

Selain itu, keterbatasan sarana pendukung juga menjadi hambatan dalam pengoperasian aplikasi.

> *"Perangkat komputer yang tersedia masih terbatas dan belum semua operator mendapatkan pelatihan teknis yang memadai terkait penggunaan SIKS-NG." (Wawancara dengan Ade Putra, Sekretaris Desa Pulau Komang, 2026).*

Hal yang sama disampaikan oleh Pendamping Bantuan Sosial.

> *"Pada beberapa desa, kendala jaringan internet dan keterbatasan fasilitas komputer masih menjadi hambatan dalam proses pembaruan data. Selain itu, pelatihan bagi operator juga perlu ditingkatkan agar penggunaan aplikasi lebih optimal." (Wawancara dengan Arief Rachman, Pendamping Bantuan Sosial, 2026).*

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi agar proses pengelolaan data bantuan sosial dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Penggunaan aplikasi SIKS-NG pada tingkat desa di Kabupaten Kuantan Singingi telah memberikan kemudahan dalam proses pendataan dan pengelolaan bantuan sosial. Namun, efektivitas penggunaannya masih belum optimal karena masih ditemukan berbagai permasalahan seperti tumpang tindih data penerima bantuan sosial, munculnya penerima yang tidak layak, ketidaksesuaian hasil pembaruan data dengan daftar penerima bantuan berikutnya, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.

Permasalahan tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas integrasi data, penguatan mekanisme verifikasi dan validasi, peningkatan kapasitas operator desa, serta penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai guna mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan akuntabel.

SARAN

1. Meningkatkan Sinkronisasi Data antara Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pusat

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data antara pemerintah desa, Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, serta Kementerian Sosial sebagai pengelola utama SIKS-NG. Berdasarkan temuan penelitian, masih ditemukan kasus nama penerima bantuan yang telah dihapus oleh pemerintah desa namun tetap muncul dalam daftar penerima bantuan pada periode berikutnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan keterlambatan atau ketidaksesuaian pembaruan data antar tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme sinkronisasi data yang lebih cepat dan terintegrasi sehingga setiap perubahan data yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat segera diperbarui dan menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial.

2. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Secara Berkala

Pemerintah desa bersama pendamping sosial dan Dinas Sosial perlu melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data secara rutin dan berkelanjutan. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga data penerima bantuan sosial harus selalu diperbarui agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kegiatan verifikasi dan validasi dapat dilakukan melalui musyawarah desa, survei lapangan, maupun kunjungan langsung ke rumah warga yang diusulkan masuk atau keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Dengan demikian, ketepatan sasaran bantuan sosial dapat lebih terjamin dan potensi kecemburuan sosial dapat diminimalkan.

3. Memberikan Pelatihan Teknis kepada Operator SIKS-NG Desa

Keberhasilan penggunaan aplikasi SIKS-NG sangat dipengaruhi oleh kemampuan operator dalam mengelola data dan mengoperasikan sistem. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala kepada operator desa mengenai penggunaan fitur-fitur SIKS-NG, prosedur penginputan data, mekanisme usulan dan sanggahan, serta penyelesaian kendala teknis yang sering terjadi. Selain pelatihan, diperlukan juga pendampingan teknis dan penyediaan panduan operasional yang mudah dipahami sehingga operator dapat bekerja secara lebih efektif dan meminimalkan kesalahan pengelolaan data.

4. Meningkatkan Kualitas Jaringan Internet dan Perangkat Pendukung

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penggunaan SIKS-NG. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh desa memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung proses penginputan dan pembaruan data secara daring. Selain itu, perlu dilakukan pengadaan atau peningkatan perangkat pendukung seperti komputer, laptop, dan perangkat penyimpanan data yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat proses pelayanan serta mengurangi hambatan teknis yang dapat mengganggu pengelolaan data bantuan sosial.

5. Meningkatkan Transparansi Informasi kepada Masyarakat

Pemerintah desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi terkait mekanisme pendataan dan penetapan penerima bantuan sosial. Transparansi dapat dilakukan melalui sosialisasi rutin, pemasangan papan informasi, publikasi daftar penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku, serta penyampaian informasi mengenai kriteria penerima bantuan sosial kepada masyarakat. Dengan adanya

keterbukaan informasi, masyarakat akan lebih memahami proses pendataan yang dilakukan sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

6. Mengembangkan Sistem Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi

Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengawasan dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat apabila ditemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. Sistem pengaduan dapat berupa kotak pengaduan di kantor desa, layanan pengaduan melalui media sosial, aplikasi digital, maupun nomor layanan khusus yang terhubung dengan pemerintah desa dan Dinas Sosial. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem pengawasan yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas data bantuan sosial sehingga kesalahan pendataan dan potensi penyalahgunaan bantuan dapat diminimalkan.

Saran Tambahan (Sangat Relevan dengan Temuan Penelitian)

Selain saran di atas, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas aplikasi SIKS-NG, khususnya terkait permasalahan data yang telah dihapus oleh pemerintah desa tetapi masih muncul kembali dalam daftar penerima bantuan sosial. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah permasalahan tersebut berasal dari aspek teknis sistem, proses sinkronisasi data, atau mekanisme kebijakan yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan sistem sehingga tujuan utama SIKS-NG sebagai instrumen pendataan bantuan sosial yang akurat, transparan, dan tepat sasaran dapat tercapai secara optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa se-Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi karena telah berkenan memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian kepada guru-guru penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiranya sehingga penulis dapat menyelesaika penelitian ini, kepada keluarga yang selalu mensupport penuh.

REFERENSI

Richard M. Steers. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Matthew B. Miles, & A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pedoman Operasional Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Moleong, Lexy J.. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.